



RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 44 B Telukbetung Utara
Telp. (0721) 470305 Bandar Lampung 53211



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kaharidat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan HidayahNya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan atas usulan dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024, Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung, Arah Kebijakan Pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan serta usulan masyarakat yang berkembang selama proses musrenbang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung baik pada skala Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari rencana kerja ini diperoleh gambaran mengenai rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama satu tahun kedepan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dan menjadi ukuran keberhasilan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2021

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE. M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Kata Pengantar..... | I |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Dokumen Renja | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Capaian Renja terhadap Renstra | 5 |
| 2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.3 Isu-Isu Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung | 14 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 17 |
| 2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan..... | 18 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN | 19 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Naional..... | 19 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 | 22 |
| 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan..... | 23 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 24 |
| BAB V | PENUTUP..... | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penyusunan Renja.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung dan telah sesuai dengan arah kebijakan maupun strategi yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2019-2024. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan Renja untuk tahun kedua dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024. Selanjutnya Renja-OPD akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menjamin kesinambungan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan maupun pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada semua pemangku kepentingan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung mengenai rencana kerja satu tahun kedepan sehingga masing-masing pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan dapat melaksanakan tugas dan perannya secara baik.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
3. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi tahapan serta mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana Renja OPD secara paralel digunakan bagi penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022.
4. Menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dalam hal pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Dokumen Renja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, dan menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi renja pada pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang terdapat dalam renja tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, kemudian tujuan serta sasaran renja pada tahun yang akan datang serta rumusan program dan kegiatan guna menunjang tujuan serta sasaran renja yang akan dicapai.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan matriks rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target dan prakiraan maju

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Capaian Renja terhadap Renstra.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.293.587.382,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.911.661.512,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.381.925.870,- dengan melaksanakan 13 program pembangunan yang terdiri dari 70 kegiatan.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 21.556.722.046,- atau sebesar 96,69%, yang terdiri dari realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.441.997.427,- atau sebesar 96,85% sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.114.724.619,- atau sebesar 96,38%.

Berikut uraian realisasi capaian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra.

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|--|--|---|---------------|----------------------------------|--|---------|---|---------|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 1 | 03.07.20.001 | Penyusunan Data Kebutuhan SDM Industri | - Jumlah dokumen data kebutuhan SDM Industri | 1 | 200.000.000 | - | - | 1 | 91.817.300 | 1 | 91.506.000 | 100 | 100 | 1 | 91.506.000 | 100 | 45,75 |
| 2 | 03.06.01.001 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 500 | 4.859.500.000 | - | - | 100 | 601.112.000 | 100 | 514.162.557 | 100 | 85,54 | 100 | 514.162.557 | 20,00 | 10,58 |
| 3 | 03.06.01.002 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | - Layanan administrasi keuangan | 500 | 2.988.000.000 | - | - | 100 | 641.100.000 | 100 | 640.656.900 | 100 | 100 | 100 | 640.656.900 | 20,00 | 21,44 |
| 4 | 03.06.01.003 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | - Layanan kebersihan kantor | 500 | 720.000.000 | - | - | 100 | 180.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 100 | 100 | 180.000.000 | 20,00 | 25,00 |
| 5 | 03.06.01.005 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Jumlah pengadaan ATK | 7800 | 416.130.000 | - | - | 3308 | 70.745.500 | 3308 | 70.670.000 | 100 | 100 | 3308 | 70.670.000 | 42,41 | 16,98 |
| 6 | 03.06.01.006 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Jumlah barang cetak dan penggandaan | 566.750 | 265.000.000 | - | - | 110.875 | 46.000.000 | 110.875 | 46.000.000 | 100 | 100 | 110.875 | 46.000.000 | 19,56 | 17,36 |
| 7 | 03.06.01.008 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik | - Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik | 1100 | 265.000.000 | - | - | 735 | 58.480.970 | 735 | 58.480.000 | 100 | 100 | 735 | 58.480.000 | 66,82 | 22,07 |
| 8 | 03.06.01.009 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 38 | 149.000.000 | - | - | 7 | 24.100.000 | 7 | 21.820.000 | 100 | 90,54 | 7 | 21.820.000 | 18,42 | 14,64 |
| 9 | 03.06.01.010 | Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah layanan makan dan minum | 250 | 209.600.000 | - | - | 35 | 36.000.000 | 35 | 18.460.000 | 100 | 51,28 | 35 | 18.460.000 | 14,00 | 8,81 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|--|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 10 | 03.06.01.011 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | - Jumlah koordinasi dan konsultasi | 567 | 1.756.200.000 | - | - | 123 | 243.446.000 | 123 | 242.661.872 | 100 | 100 | 123 | 242.661.872 | 21,69 | 13,82 |
| 11 | 03.06.01.013 | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran | - Jumlah tenaga PTHL | 140 | 3.382.000.000 | - | - | 29 | 679.300.000 | 29 | 672.100.000 | 100 | 98,94 | 29 | 672.100.000 | 20,71 | 19,87 |
| 12 | 03.06.02.002 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung | 50 | 1.437.600.900 | - | - | 17 | 234.565.000 | 17 | 221.667.000 | 100 | 94,50 | 17 | 221.667.000 | 34,00 | 15,42 |
| 13 | 03.06.02.003 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 20 | 1.320.000.000 | - | - | 2 | 374.500.000 | 2 | 373.496.000 | 100 | 100 | 2 | 373.496.000 | 10,00 | 28,30 |
| 14 | 03.06.02.004 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 85 | 2.946.264.600 | - | - | 11 | 239.894.100 | 11 | 223.141.490 | 100 | 93,02 | 11 | 223.141.490 | 12,94 | 7,57 |
| 15 | 03.06.02.005 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 440 | 325.000.000 | - | - | 99 | 35.000.000 | 99 | 35.000.000 | 100 | 100 | 99 | 35.000.000 | 22,5 | 10,77 |
| 16 | 03.06.03.001 | Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional | - Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan sosialisasi | 150 | 375.000.000 | - | - | 7 | 33.754.300 | 7 | 27.160.000 | 100 | 80,46 | 7 | 27.160.000 | 4,67 | 7,24 |
| 17 | 03.06.03.002 | Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur | - Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan, | 20 | 145.000.000 | - | - | 95 | 33.293.000 | 95 | 24.927.000 | 100 | 74,87 | 95 | 24.927.000 | 475 | 17,19 |
| 18 | 03.06.04.001 | Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja | - Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja | 45 | 597.500.000 | - | - | 8 | 44.049.000 | 8 | 44.037.000 | 100 | 100 | 8 | 44.037.000 | 17,78 | 7,37 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|--|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 19 | 03.06.04.002 | Penyusunan Laporan Capaian Keuangan | - Jumlah dokumen pelaporan capaian Keuangan | 10 | 144.000.000 | - | - | 1 | 15.476.000 | 1 | 14.494.000 | 100 | 93,65 | 1 | 14.494.000 | 10,00 | 10,07 |
| 20 | 03.06.04.003 | Penyusunan dokumen perencanaan | - Jumlah dokumen perencanaan | 45 | 1.485.000.000 | - | - | 9 | 48.000.000 | 9 | 47.987.300 | 100 | 100 | 9 | 47.987.300 | 20,00 | 3,23 |
| 21 | 03.06.04.004 | Pengembangan E-Goverment Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan | - Jumlah waktu pembaharuan data dan informasi | 60 | 1.900.000.000 | - | - | 12 | 147.000.000 | 12 | 146.699.000 | 100 | 100 | 12 | 146.699.000 | 20,00 | 7,72 |
| 22 | 03.06.04.005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset | - Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset | 17 | 182.000.000 | - | - | 4 | 16.000.000 | 4 | 15.624.000 | 100 | 97,65 | 4 | 15.624.000 | 23,53 | 8,58 |
| 23 | 03.06.20.001 | Pemantauan Harga Bahan Pokok serta Barang Strategis | - Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis (lap) | 5 | 453.170.000 | - | - | 1 | 66.755.000 | 1 | 54.773.500 | 100 | 82,05 | 1 | 54.773.500 | 20,00 | 12,09 |
| 24 | 03.06.20.002 | Penetrasi Pasar Kebutuhan Bahan Pokok | - Jumlah kegiatan penetrasi pasar kebutuhan bahan pokok (kali) | 31 | 871.000.000 | - | - | 5 | 46.000.000 | 5 | 45.935.900 | 100 | 100 | 5 | 45.935.900 | 16,13 | 5,27 |
| 25 | 03.06.20.004 | Pasar Murah Bersubsidi | - Jumlah kegiatan pasar murah bersubsidi (kali) | 155 | 7.750.000.000 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 03.06.20.005 | Pemasaran Produk PKM Unggulan | - Jumlah event fasilitasi produk PKM (event) | 73 | 1.450.000.000 | - | - | 1 | 350.000.000 | 1 | 347.000.000 | 100 | 99,14 | 1 | 347.000.000 | 1,37 | 23,93 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|--|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 27 | 03.06.20.006 | Forum Koordinasi Penataan Pasar dan Sarana Perdagangan | - Jumlah koordinasi penataan pasar dan sarana perdagangan (kali) | 13 | 850.000.000 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 03.06.20.007 | Fasilitasi Merk Dagang dan Halal | - Jumlah UKM yang terfasilitasi (UKM) | 320 | 1.183.000.000 | - | - | 35 | 37.500.000 | 35 | 37.499.800 | 100 | 100 | 35 | 37.499.800 | 10,94 | 3,17 |
| 29 | 03.06.20.008 | Diklat Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Dokumen dan Persyaratan Dalam Perdagangan Dalam Negeri | - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti diklat (UKM/PKM) | 325 | 339.000.000 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 03.06.20.009 | Transformasi Digital UKM/PKM Unggulan | - Jumlah PKM/UKM yang mengikuti kegiatan (UKM/PKM) | 590 | 1.950.000.000 | - | - | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | 16,95 | 5,13 |
| 31 | 03.06.20.010 | Promosi Luar Daerah | - Jumlah Event Promosi yang diikuti | 19 | 1.250.000.000 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 03.06.20.011 | Promosi Produk Unggulan Pada Event Nasional | - Jumlah Partisipasi Event Nasional | 14 | 1.600.000.000 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 03.06.20.013 | Membangun Jejaring Pasar Dalam Daerah dan Luar Daerah | - Jumlah Kerjasama Pemasaran Komoditi Unggulan | 5 | 428.060.000 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 03.06.21.002 | Pengawasan barang-barang dalam pengawasan (Barang Berbahaya dan Minuman Beralkohol) | - Jumlah Pengawasan B2 dan Minuman beralkohol yang diperdagangkan pertahun | 29 | 590.000.000 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 03.06.21.003 | Pengawasan Barang Beredar | - Jumlah Pengawasan | 82 | 910.000.000 | - | - | 6 | 34.909.600 | 6 | 34.561.000 | 100 | 99,00 | 6 | 34.561.000 | 7,32 | 3,8 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|---|---|---------------|----------------------------------|--|------|---|------|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| | | dan Jasa | barang beredar dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 03.06.21.004 | Pengawasan Barang yang diatur tata niaganya | - Jumlah Pengawasan | 70 | 745.000.000 | - | - | 2 | 17.121.000 | 2 | 17.106.950 | 100 | 100 | 2 | 17.106.950 | 2,86 | 2,3 |
| 37 | 03.06.21.005 | Fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | - Jumlah BPSK yang difasilitasi | 15 | 1.700.000.000 | - | - | 1 | 34.207.000 | 1 | 20.731.200 | 100 | 60,61 | 1 | 20.731.200 | 6,67 | 1,22 |
| 38 | 03.06.21.007 | Festival Konsumen Cerdas | - Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Peserta Festival | 5600 | 2.000.000.000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 03.06.22.001 | Peningkatan Sarana Laboratorium | - Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium (unit) | 35 | 2.750.000.000 | - | - | 20 | 145.635.800 | 20 | 145.634.400 | 100 | 100 | 20 | 145.634.400 | 57,14 | 5,3 |
| 40 | 03.06.22.002 | Pelayanan Mutu Komoditi | - Jumlah sertifikat mutu komoditi | 9392 | 2.950.000.000 | - | - | 1810 | 231.154.300 | 1810 | 231.000.150 | 100 | 100 | 1810 | 231.000.150 | 19,27 | 7,83 |
| 41 | 03.06.22.003 | Peningkatan Kompetensi Penguji Mutu barang dan Petugas Pengambil contoh | - jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh | 20 | 1.250.000.000 | - | - | 3 | 7.281.050 | 3 | 4.463.500 | 100 | 61,30 | 3 | 4.463.500 | 15,00 | 0,36 |
| 42 | 03.06.22.004 | Pelayanan Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang | - Jumlah waktu pelayanan | 5 | 2.075.000.000 | - | - | 1 | 86.969.700 | 1 | 69.944.700 | 100 | 80,42 | 1 | 69.944.700 | 20,00 | 3,37 |
| 43 | 03.06.22.005 | Pelayanan Sertifikat Kalibarsi | - Jumlah sertifikat kalibrasi | 133 | 800.000.000 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 03.06.22.006 | Peningkatan Kompetensi SDM Lab. Kalibrasi | - Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan | 25 | 895.000.000 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 03.06.22.007 | DAK Peralatan Laboratorium | Jumlah alat laboratorium | 3 | 5.625.000.000 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|--|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 46 | 03.06.23.001 | Akses, Survey dan Konsultasi Pasar Eksport bagi UKM melalui Digital Marketing | - Jumlah eksportir baru yang memanfaatkan digital market | 34 | 2.200.000.000 | - | - | 5 | 21.826.100 | 5 | 21.784.000 | 100 | 100 | 5 | 21.784.000 | 14,71 | 0,99 |
| 47 | 03.06.23.002 | Pemberian Penghargaan Eksportir Terbaik Tahunan | - Jumlah kegiatan penghargaan eksportir terbaik | 5 | 865.000.000 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 03.06.23.004 | Bimtek bagi Calon Eksportir dan Eksportir Pemula | - Jumlah eksportir yang mengikuti diklat | 700 | 1.900.000.000 | - | - | 40 | 125.775.000 | 40 | 95.180.000 | 100 | 75,67 | 40 | 95.180.000 | 5,71 | 5,01 |
| 49 | 03.06.23.005 | Verifikasi dan Identifikasi Asal barang Ekspor di Provinsi Lampung | - Jumlah Laporan Produk Asal Lampung | 60 | 1.220.000.000 | - | - | 12 | 60.000.000 | 12 | 59.969.400 | 100 | 100 | 12 | 59.969.400 | 20,00 | 4,92 |
| 50 | 03.06.23.008 | Promosi Luar Negeri | - Jumlah UKM yang dipromosikan | 17 | 3.633.164.500 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 03.06.23.009 | Promosi Produk Ekspor | - Jumlah UKM yang dipromosikan | 27 | 1.525.000.000 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 03.06.23.010 | Pencitraan Produk Unggulan ke Luar Negeri | - Jumlah tujuan negara promosi | 155 | 2.720.000.000 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 03.07.20.002 | Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan Dunia Industri | - Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDM industri | 21 | 1.540.000.000 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 03.07.20.003 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri | - Jumlah SDM Industri yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi | 450 | 3.291.813.000 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 03.07.21.001 | Penyusunan Data Potensi Kemitraan Industri | - Jumlah dokumen data kemitraan industri | 1 | 150.000.000 | - | - | 1 | 103.324.400 | 1 | 101.907.000 | 100 | 98,63 | 1 | 101.907.000 | 100 | 67,94 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|---|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 56 | 03.07.21.003 | Fasilitasi Pemasaran Produk Industri Unggulan Daerah | - Jumlah fasilitasi pemasaran produk industri | 2 | 300.000.000 | - | - | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 100 | 100 | 2 | 300.000.000 | 100 | 100 |
| 57 | 03.07.21.004 | Peningkatan Promosi Investasi dan Fasilitasi Penanaman Modal Bidang Industri | - Jumlah fasilitasi promosi investasi bidang industri | 35 | 2.910.000.000 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 03.07.21.005 | Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Bidang Industri | - Jumlah pemantauan terhadap unit usaha industri besar | 640 | 2.830.000.000 | - | - | 50 | 73.009.500 | 50 | 72.941.000 | 100 | 100 | 50 | 72.941.000 | 7,81 | 2,58 |
| 59 | 03.07.21.006 | Fasilitasi Perizinan Bidang Industri | - Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar | 70 | 1.602.500.000 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 03.07.22.002 | Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) IKM Makanan dan Minuman | - Jumlah IKM yang mendapat pelatihan GMP | 500 | 1.760.000.000 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 03.07.22.003 | Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk IKM | - Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk | 860 | 3.030.000.000 | - | - | 140 | 785.000.000 | 140 | 766.975.500 | 100 | 97,70 | 140 | 766.975.500 | 16,28 | 25,31 |
| 62 | 03.07.22.004 | Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Industri | - Jumlah fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri | 19 | 6.691.105.000 | - | - | 1 | 478.460.000 | 1 | 477.570.000 | 100 | 100 | 1 | 477.570.000 | 5,26 | 7,14 |
| 63 | 03.07.22.005 | Pembinaan Industri Hijau | - Jumlah industri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau | 150 | 2.700.000.000 | - | - | 5 | 11.380.000 | 5 | 11.178.300 | 100 | 98,23 | 5 | 11.178.300 | 3,33 | 0,41 |

| No | Kode Permendagri | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra | | Realisasi Renstra s/d Tahun 2019 | Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020 | | Tingkat Capaian s.d TW IV Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Renstra (%) | | |
|----|------------------|---|---|---|---------------|----------------------------------|--|-----|---|-----|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 | |
| 64 | 03.07.23.001 | Pembinaan Standarisasi Industri | - Jumlah unit usaha industri yang menerapkan standarisasi industri | 215 | 3.650.000.000 | - | - | 15 | 27.920.750 | 15 | 25.325.000 | 100 | 90,70 | 15 | 25.325.000 | 6,98 | 0,69 |
| 65 | 03.07.23.002 | Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri | - Jumlah fasilitasi pengembangan KI | 50 | 5.550.000.000 | - | - | 1 | 80.539.500 | 1 | 79.524.500 | 100 | 98,74 | 1 | 79.524.500 | 2,00 | 1,43 |
| 66 | 03.07.23.003 | Pendampingan dan Pengembangan Sentra IKM | - Jumlah fasilitasi pengembangan SIKIM | 66 | 1.850.000.000 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 03.07.23.005 | Pengelolaan Data dan Informasi Industri | - Jumlah dokumen laporan data dan informasi industri besar | 5 | 4.190.000.000 | - | - | 1 | 63.811.000 | 1 | 63.809.500 | 100 | 100 | 1 | 63.809.500 | 20,00 | 1,52 |
| 68 | 03.07.24.001 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran | - Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran | 60 | 2.700.000.000 | - | - | 12 | 15.346.000 | 12 | 15.207.700 | 100 | 99,10 | 12 | 15.207.700 | 20,00 | 0,56 |
| 69 | 03.07.24.002 | Peningkatan Layanan Rumah Kawasan | - Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemasan | 3950 | 3.325.000.000 | - | - | 70 | 107.091.000 | 70 | 106.824.900 | 100 | 100 | 70 | 106.824.900 | 1,77 | 3,21 |
| 70 | 03.07.24.003 | Peningkatan Layanan Workshop Industri | - Jumlah IKM yang memperoleh layanan workshop industri | 515 | 2.970.000.000 | - | - | 40 | 77.276.000 | 40 | 77.126.600 | 100 | 100 | 40 | 77.126.600 | 7,77 | 2,60 |
| | | | | | | | | | | | | Rata-Rata capaian kinerja % | 70,00 | 65,70 | | 21,99 | 9,11 |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | sedang | sedang | | Sangat rendah | Sangat rendah |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | 20,15 | 20,5 | 20,85 | 21,2 | 19,41 | - | 20,80 - 20,90 | 21 - 21,3 | |
| 2 | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB | 11,2 | 11,25 | 11,3 | 11,35 | 8,32 | - | 10,85 - 11,35 | 11 - 11,4 | |
| 3 | Nilai Ekspor Non Migas | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | - | 3,4 - 3,7 | 3,5 - 3,8 | |
| 4 | Andil inflasi bahan makanan | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,51 | 0,10 – 0,52 | 0,10 – 0,54 | 1,15 | - | 0,5 - 2.00 | 0,5 - 2.00 | |

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya dan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas pokok serta fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 membuat sektor IKM/PKM menderita dampak yang sangat berat.

2. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
3. Masih rendahnya kesadaran dari pelaku industri untuk melakukan proses produksi yang berorientasi lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip industri hijau;
4. Tidak tersedianya *roadmap* pembangunan SDM Industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku penyedia dengan dunia industri selaku *user*;
5. Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
6. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;
7. Informasi yang terkait potensi investasi dan perizinan dibidang perindustrian di Provinsi Lampung belum ter-diseminasikan dengan baik kepada calon investor dan ada pada skala nasional maupun internasional;
8. Masih rendahnya kompetensi aparatur Dinas Perindustrian terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan berusaha industri;
9. Penerapan SNI wajib masih belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku industri terutama industri kecil dan menengah;
10. Pembangunan industri masih terkendala pengembangan perwilayahannya industri (WPPI, KPI, KI, SIKIM) keterbatasan infrastruktur penunjang industri;
11. Belum tersedianya data yang mutakhir terkait unit usaha industri dan kawasan industri yang ada di Provinsi Lampung;
12. Belum meratanya penerapan teknologi informasi dalam perdagangan;
13. Pengelolaan dan pengawasan *e-commerce* yang belum jelas;
14. Rendahnya kinerja BPSK;
15. Rendahnya pengetahuan konsumen di kabupaten tentang hak – haknya;
16. Rendahnya pengetahuan pedagang/penjual tentang standarisasi produk yang diperdagangkan;
17. Rendahnya cakupan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan;

18. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditi unggulan;
19. Masih mengandalkan negara tujuan ekspor utama;
20. Fluktuasi harga bahan pangan pokok penting khusunya pada saat HBKN.

Berdasarkan hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta dari hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, maka isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti pada penyusunan Renja tahun 2022 guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Daerah akibat pandemi *Covid-19* yang berfokus pada IKM dan PKM/UKM.
2. Percepatan pengembangan KI Way Pisang guna mendukung sektor industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok
4. Kesiapan dalam menghadapi industri 4.0
5. Peningkatan kapasitas lembaga, daya saing, literasi PKM dalam menghadapi era ekonomi digital.
6. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok penting.
7. Peningkatan perlindungan konsumen.
8. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tiap kota dan kabupaten.
9. Pengembangan produk ekspor potensial dan inovatif.
10. Peningkatan informasi guna membuka akses pasar ekspor.
11. Pengembangan citra produk/komoditi Provinsi Lampung.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2021 di arahkan pada :

| Sasaran Pembangunan Daerah 2019 | Indikator | Target Tahun 2022 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Sasaran Makro | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,6 - 5,9 |
| | Inflasi (%) | 3 ± 1 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,66 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,14 – 11,5 |
| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,49 |
| | Rasio Gini | 0,32 - 0,33 |
| | Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) | 48,2 |
| | Nilai Tukar Petani (NTP) | 107,98 |
| | Tingkat Pemantapan jalan | 81 |

Berdasarkan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada sasaran pokok dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2022 dan RKP Tahun 2022 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan RKP Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang bertema : **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Peningkatan SDM Berkualitas”**. Dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutandan Mitigasi Bencana.

Enam prioritas pembangunan tahun 2022 tersebut, diarahkan pula pada pencapaian sasaran pembangunan yang selaras dengan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Rancangan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus didiskusikan di dalam Musrenbang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Renja Dinas kabupaten/kota yang membidangi sektor industri dan sektor perdagangan. Sehingga terciptanya keselarasan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung. Sampai saat penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung belum melaksanakan musrenbang sektor perindustrian dan perdagangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang dicanangkan dalam rancangan awal RKP Tahun 2022 adalah : “**Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Yang Inklusif**”. Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rancangan awal RKP Tahun 2022, pemerintah pusat telah menyusun prioritas pembangunan nasional tahun 2022 yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 , sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

Adapun, sasaran makro pembangunan nasional selama tahun 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020 - 2024

| Sasaran Dalam RPJMN 2020 - 2024 | Indikator | Target Tahun 2022* |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Sasaran Makro | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,4 – 6,0 |
| | Rasio Gini (nilai) | 0,376 – 0,378 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,5 – 6,2 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,5 – 9,5 |
| | Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) | 73,44 – 73,48 |

Sesuai dengan penjabaran diatas, Arahan sektor perindustrian dan sektor perdagangan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **Sektor Perindustrian**

Dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, sektor perindustrian berada dalam agenda pembangunan/prioritas nasional Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas nasional ini memiliki 8 program prioritas, dimana sektor perindustrian berada dalam 4 program prioritas dengan setiap program prioritas memiliki kegiatan prioritas. Penjabaran dari keempat program prioritas yang menjadi arah bagi sektor industri adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas 5 : Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.
 - KP 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - KP 4. Peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*.
2. Program Prioritas 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan, pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
 - KP 2. Peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa
 - KP 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata
 - KP 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha dan digital
 - KP 6. Pengembangan Industri halal
3. Program Prioritas 7 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa

- KP 4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
4. Program Prioritas 8 : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dengan kegiatan prioritas :
- KP 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
 - KP 4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata

- **Sektor Perdagangan**

Dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, sektor perdagangan berada dalam agenda pembangunan/prioritas nasional Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Arah sektor perdagangan dalam program prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas 5 : Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.
 - KP 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - KP 4. Peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*.
2. Program Prioritas 6 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa
 - KP 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
 - KP 3. Pengelolaan impor
 - KP 4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
 - KP 5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global
 - KP 6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital

- KP 7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi
3. Program Prioritas 8 : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- Dengan kegiatan prioritas :
- KP 3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 -2024 , Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 maupun perkiraan kinerja Tahun berjalan maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dijabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tahun 2022 |
|----|--|---|---------|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%) | 1 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | 20,85 |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) | 2 | Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%) | 11,3 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tahun 2022 |
|----|--------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 3 Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$) | 3,6 | |
| 2 | Menjaga Stabilitas Harga | Laju Inflasi (%) | 4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan (%) | 0,50 - 2,00 | |

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan.

Pada Renja tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengusulkan akan melaksanakan 9 program, 20 kegiatan dan 51 kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 39.040.000.000,- guna mendukung target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan. Seluruh Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah disusun, rencananya akan dilaksanakan di 13 Kabupaten serta 2 kota yang terdapat di Provinsi Lampung serta di luar Provinsi Lampung.

Usulan ini telah mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024 serta telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2021. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian visi Gubernur Lampung yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”** dan mendukung misi ke – 5 yaitu **“Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan”**. Serta mendukung janji kerja Gubernur Lampung.

Selain untuk mendukung visi dan misi Gubernur Lampung, seluruh program, kegiatan, serta sub kegiatan yang disusun juga memperhatikan dan mengakomodir *Sustainable Development Goal's*, Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan daerah tertinggal, Penyetaraan Gender, Pemberantasan Stunting di Provinsi Lampung,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini kami menyajikan matrik/tabel rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target dan prakiraan maju dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan pada renja tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 4.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4,150,000,000 | | | | 4,745,000,000 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 90,000,000 | | | | 100,000,000 |
| 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | | | 90,000,000 | | | | 100,000,000 |
| 3.30.03.1.01.02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian PDP | Provinsi Lampung | 1 Kegiatan | 90,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 100,000,000 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 910,000,000 | | | | 1,095,000,000 |
| 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu | | 5- 6,5% | 70,000,000 | | | 5- 6,5% | 80,000,000 |
| 3.30.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | Provinsi Lampung | 4 Kali | 50,000,000 | APBD | | 4 Kali | 50,000,000 |
| 3.30.04.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | Provinsi Lampung | 2 kali | 20,000,000 | APBD | | 2 kali | 30,000,000 |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu | | 5- 6,5% | 690,000,000 | | | 5- 6,5% | 840,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30.04.1.02.01 | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota | Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis | Bandar Lampung | 1 Laporan | 90,000,000 | APBD | | 1 Laporan | 90,000,000 |
| 3.30.04.1.02.02 | Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan stabilisasi harga pangan pokok | Provinsi Lampung | 15 Kali | 600,000,000 | APBD | | 20 Kali | 750,000,000 |
| 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Persentase kinerja realisasi pupuk | | 80% | 150,000,000 | | | 85% | 175,000,000 |
| 3.30.04.1.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi | Kab/Kota | 6 Kali | 150,000,000 | APBD | | 6 Kali | 175,000,000 |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 950,000,000 | | | | 1,125,000,000 |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi | Pelaku usaha yang menjadi eksportir | | 5 UKM | 950,000,000 | | | 7 UKM | 1,125,000,000 |
| 3.30.05.1.01.01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah UKM yang dipromosikan | Luar Negeri | 3 UKM | 500,000,000 | APBD | | 4 UKM | 600,000,000 |
| 3.30.05.1.01.04 | Peningkatan Citra produk ekspor | Jumlah negara tujuan promosi | Luar Negri | 13 Negara | 100,000,000 | APBD | | 15 Negara | 125,000,000 |
| 3.30.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah eksportir yang mengikuti pelatihan | Provinsi Lampung | 80 Orang | 350,000,000 | APBD | | 100 Orang | 400,000,000 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 1,650,000,000 | | | | 1,800,000,000 |
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen | | 3 Kegiatan | 720,000,000 | | | 3 Kegiatan | 770,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30.06.1.01.01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumlah kegiatan pemberdayaan konsumen | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 550,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 600,000,000 |
| | | Jumlah BPSK yang difasilitasi | | 1 Unit | | | | 1 Unit | |
| 3.30.06.1.01.02 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | Jumlah kegiatan peningkatan hubungan kerja | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 85,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 85,000,000 |
| 3.30.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 85,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 85,000,000 |
| 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengujian Mutu | | 1% | 650,000,000 | | | 1% | 700,000,000 |
| 3.30.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan pengujian | Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium | Bandar Lampung | 7 Unit | 250,000,000 | APBD | | 5 Unit | 250,000,000 |
| | | Jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh yang mengikuti pelatihan | | 4 Orang | | | | 4 Orang | |
| 3.30.06.1.02.03 | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Jumlah Sertifikat mutu komoditi | Bandar Lampung | 1915 Sertifikat | 350,000,000 | APBD | | 1915 Sertifikat | 375,000,000 |
| 3.30.06.1.02.04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Jumlah Sertifikat kalibrasi | Bandar Lampung | 40 Sertifikat | 50,000,000 | APBD | | 40 Sertifikat | 75,000,000 |
| 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan | | 15% | 280,000,000 | | | 17,5% | 330,000,000 |
| 3.30.06.1.01.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah pengawasan | Kab/Kota | 70 Kali | 260,000,000 | APBD | | 95 Kali | 300,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30.06.1.01.03.02 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah kegiatan fasilitasi | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 20,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 30,000,000 |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 550,000,000 | | | | 625,000,000 |
| 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan | | 15% | 300,000,000 | | | 20% | 350,000,000 |
| 3.30.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah PKM/UKM yang dipromosikan | Bandar Lampung | 10 PKM/UKM | 300,000,000 | APBD | | 10 PKM/UKM | 350,000,000 |
| 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | Persentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi | | 15% | 250,000,000 | | | 20% | 275,000,000 |
| 3.30.07.1.03.01 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah PKM/UKM yang ditingkatkan kualitas produknya | Bandar Lampung | 70 PKM | 150,000,000 | APBD | | 75 PKM | 175,000,000 |
| 3.30.07.1.03.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah kegiatan peningatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 100,000,000 |
| 31 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 14,025,000,000 | | | | 15,000,000,000 |
| 31:02:00 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 13,375,000,000 | | | | 14,250,000,000 |
| 31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi | Persentase rata - rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP | | 85% | 13,375,000,000 | | | 90% | 13,500,000,000 |
| 31.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri | Jumlah kegiatan pengembangan kawasan industri | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 10,000,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 10,000,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 31.02.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Junlah SDM Industri yang mengikuti vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan | Kab.Kota | 80 Orang | 1,000,000,000 | APBD | | 100 Orang | 1,150,000,000 |
| | | Jumlah fasilitasi kesepakatan kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri | | 3 Kegiatan | | | | 3 Kegiatan | |
| 31.02.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Kegiatan Pengembangan IKM | Kab/Kota | 1 Sentra | 555,000,000 | APBD | | 1 Sentra | 600,000,000 |
| | | Jumlah Unit Usaha Industri yang menerapkan Standarisasi Industri | | 40 Unit | | | | 50 Unit | |
| 31.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Junlah IKM yang mengikuti vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan | Kab/Kota | 350 IKM | 1,500,000,000 | APBD | | 450 IKM | 1,750,000,000 |
| | | Jumlah fasilitasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | | 3 Kegiatan | | | | 3 Kegiatan | |
| 31.02.1.01.06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 320,000,000 | APBD | | - | - |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 300,000,000 | | | | 350,000,000 |
| 3.31.03.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar | 12 Rekomendasi | | 300,000,000 | | | 15 Rekomendasi | 350,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.31.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah sosialisasi penerbitan IUI | Kab/Kota | 1 Kegiatan | 150,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 175,000,000 |
| 3.31.03.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi | Jumlah pengawasan pelaksanaan IUI | Kab/Kota | 6 Kali | 150,000,000 | APBD | | 7 Kali | 175,000,000 |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 350,000,000 | | | | 400,000,000 |
| 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS) | Jumlah pengelolaan data dan informasi industri | | 12 Bulan | 350,000,000 | | | 12 Bulan | 400,000,000 |
| 3.31.04.1.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Jumlah kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi | Bandar Lampung | 2 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | | 2 Kegiatan | 225,000,000 |
| 3.31.04.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri | Kab/Kota | 1 Laporan | 150,000,000 | APBD | | 1 Laporan | 175,000,000 |
| 3 | URUSAN PENUNJANG | | | | 20,865,000,000 | | | | 21,240,000,000 |
| 3.30 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 20,865,000,000 | | | | 21,240,000,000 |
| 3.30.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan | | 90% | 330,000,000 | | | 95% | 340,000,000 |
| 3.30.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | Bandar Lampung | 9 Dokumen | 180,000,000 | APBD | | 9 Dokumen | 185,000,000 |
| 3.30.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | Bandar Lampung | 5 Dokumen | 150,000,000 | APBD | | 5 Dokumen | 155,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan administrasi keuangan | | 100% | 17,250,000,000 | | | 100% | 17,345,000,000 |
| 3.30.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Bandar Lampung | 12 Bulan | 17,100,000,000 | APBD | | 12 Bulan | 17,185,000,000 |
| 3.30.01.1.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah bulan pentausahaan dan verifikasi keuangan | Bandar Lampung | 12 Bulan | 60,000,000 | APBD | | 12 Bulan | 65,000,000 |
| 3.30.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan | Bandar Lampung | 1 Laporan | 45,000,000 | APBD | | 1 Laporan | 47,500,000 |
| 3.30.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan | Bandar Lampung | 12 Bulan | 45,000,000 | APBD | | 12 Bulan | 47,500,000 |
| 3.30.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Layanan administrasi kepegawaian | | 100% | 135,000,000 | | | 100% | 147,500,000 |
| 3.30.01.1.05.01 | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah dokumen jabatan | Bandar Lampung | 2 Dokumen | 25,000,000 | APBD | | 2 Dokumen | 27,500,000 |
| 3.30.01.1.05.09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan diklat | Bandar Lampung | 15 Orang | 80,000,000 | APBD | | 18 Orang | 85,000,000 |
| 3.30.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan | Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang - undangan | Bandar Lampung | 1 Kegiatan | 30,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan | 35,000,000 |
| 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase rata - rata capaian sub kegiatan | | 90% | 575,000,000 | | | 95% | 622,500,000 |
| 3.30.01.1.06.01 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah unit Listrik/penerangan kantor | Bandar Lampung | 60 Unit | 20,000,000 | APBD | | 70 Unit | 22,500,000 |
| 3.30.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan ATK | Bandar Lampung | 525 Unit | 60,000,000 | APBD | | 575 Unit | 65,000,000 |
| 3.30.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Bandar Lampung | 65 Buah | 20,000,000 | APBD | | 65 Buah | 22,500,000 |
| 3.30.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan | Bandar Lampung | 225000 Lembar | 45,000,000 | APBD | | 237500 Lembar | 47,500,000 |
| 3.30.01.1.06.07 | Penyediaan bahan/material | Jumlah Unit bahan material yang tersedia | Bandar Lampung | 2 unit | 50,000,000 | APBD | | 2 unit | 55,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3.30.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan makan dan minum | Bandar Lampung | 50 Kali | 30,000,000 | APBD | | 55 Kali | 35,000,000 |
| 3.30.01.1.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | Bandar Lampung | 55 Kali | 350,000,000 | APBD | | 60 Kali | 375,000,000 |
| 3.30.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kesesuaian pengadaan dengan rencana pengadaan | | 85% | 250,000,000 | | | 90% | 250,000,000 |
| 3.30.01.1.07.10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor | Bandar Lampung | 25 Unit | 250,000,000 | APBD | | 15 Unit | 250,000,000 |
| 3.30.01.1.08 | Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase rata - rata capaian sub kegiatan | | 90% | 1,525,000,000 | | | 95% | 1,625,000,000 |
| 3.30.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bandar Lampung | 100% | 425,000,000 | APBD | | 100% | 525,000,000 |
| 3.30.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor | Jumlah waktu pelayanan umum kantor | Bandar Lampung | 12 Bulan' | 1,100,000,000 | APBD | | 12 Bulan' | 1,100,000,000 |
| 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan | | 10% | 800,000,000 | | | 15% | 910,000,000 |
| 3.30.01.1.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Bandar Lampung | 8 Unit | 400,000,000 | APBD | | 9 Unit | 450,000,000 |
| 3.30.01.1.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Yang Terpelihara | Bandar Lampung | 2 unit | 350,000,000 | APBD | | 2 unit | 400,000,000 |
| 3.30.01.1.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarpras Yang terpelihara | Bandar Lampung | 40 Unit | 50,000,000 | APBD | | 50 Unit | 60,000,000 |
| TOTAL | | | | | 39,040,000,000 | | | | 40,985,000,000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2022 diajukan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024 khususnya pada rencana kegiatan di Tahun 2022, prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2022 serta usulan kegiatan yang berasal dari musrenbang Kabupaten/Kota yang berkembang selama dilakukannya musyawarah perencanaan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung.

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini juga akan disesuaikan kembali dengan pagu anggaran yang tersedia dengan tetap mengacu kepada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, prioritas pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, serta berbagai kebijakan yang berkembang selama proses penyusunan anggaran.